



BANK INDONESIA



REPUBLIK INDONESIA



KETIMPANGAN KOTA-DESA, ANTARWILAYAH, DAN ANTAR-KELOMPOK PENDAPATAN

MEMAHAMI POLA, PENYEBAB, DAN JALAN KEBIJAKAN UNTUK
PEMBANGUNAN YANG LEBIH ADIL DAN BERKELANJUTAN

OLEH
RUDY C TARUMINGKENG

KETIMPANGAN KOTA-DESA

Kota lebih maju,
Desa masih tertinggal



KEMISKINAN

Kota: 6,60%
Desa: 10,72%

Sept 2025



ANTARWILAYAH

Pertumbuhan & kualitas hidup
masih timpang

KONTRIBUSI PDB 2025

Jawa 56,93%
Lainnya 43,07%



IPM 2025 (Contoh)

DKI Jakarta 85,05
Papua Pegunungan 54,91

ANTAR-KELOMPOK PENDAPATAN

Peluang hidup yang berbeda, masa depan yang tidak sama



RATA-RATA LAMA SEKOLAH

Kuintil 1: 7,58 th
Kuintil 5: 11,76 th



APK PERGRUJUAN TINGGI

Kuintil 1: 17,30
Kuintil 5: 55,37



SANITASI LAYAK

Kuintil 1: 76,70%
Kuintil 5: 92,08%



PENGELUARAN 40% TERBAWAH

Kota: 18,32% | Desa: 22,09%
Nasional: 19,28%



PEMERATAAN
EKONOMI DAERAH



PENINGKATAN
LAYANAN DASAR



PENDIDIKAN &
KESEHATAN MERATA



PEKERJAAN LAYAK
UNTUK SEMUA



MOBILITAS SOSIAL
YANG LEBIH KUAT



INDONESIA MAJU
YANG INKLUSIF

DATA AKURAT • ANALISIS MENDALAM • KEBIJAKAN TEPAT • KESEJAHTERAAN MERATA

Rudy C Tarumingkeng: Ketimpangan kota-desa, antarwilayah, dan
antar-kelompok pendapatan

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Chairman, Board of Professors, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Chairman, Academic Senate, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyc75@gmail.com

7 April 2026

KETIMPANGAN KOTA-DESA, ANTARWILAYAH, DAN ANTAR-KELOMPOK PENDAPATAN

Abstrak

Makalah ini membahas ketimpangan di Indonesia dalam tiga lapis utama, yakni ketimpangan kota-desa, ketimpangan antarwilayah, dan ketimpangan antar-kelompok pendapatan. Tesis utama makalah ini adalah bahwa ketimpangan di Indonesia tidak lagi memadai bila dibaca hanya sebagai jurang antara "kaya" dan "miskin". Ia bekerja secara bertumpuk: sebagian wilayah lebih maju daripada wilayah lain, sebagian penduduk menikmati akses layanan dasar dan peluang ekonomi jauh lebih baik daripada kelompok lain, dan relasi kota-desa sendiri memperlihatkan paradoks bahwa perkotaan cenderung lebih tidak setara, sedangkan perdesaan cenderung lebih miskin. Pada September 2025, gini ratio nasional tercatat 0,363; di perkotaan 0,383; dan di perdesaan 0,295. Pada waktu yang sama, persentase penduduk miskin di perkotaan sebesar 6,60 persen, sedangkan di perdesaan 10,72 persen. Dengan ukuran Bank Dunia, pangsa pengeluaran 40 persen terbawah secara nasional sebesar 19,28 persen, tetapi di perkotaan hanya 18,32 persen dan di perdesaan 22,09 persen. Secara spasial, perekonomian Indonesia pada 2025 masih sangat terkonsentrasi di Jawa dengan kontribusi 56,93 persen terhadap PDB nasional, sementara wilayah Maluku dan Papua hanya tumbuh 2,69 persen.

Di tingkat provinsi, ketimpangan juga sangat lebar: gini ratio tertinggi pada September 2025 tercatat di Papua Selatan sebesar 0,426 dan terendah di Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,214. Kesenjangan kualitas hidup juga terlihat dalam Indeks Pembangunan Manusia 2025: DKI Jakarta mencapai 85,05, DI Yogyakarta 82,48, sedangkan Papua Pegunungan hanya 54,91. Pada tingkat antarkelompok pendapatan, jurang peluang juga sangat jelas: rata-rata lama sekolah penduduk umur 15 tahun ke atas pada kuintil pengeluaran terbawah hanya 7,58 tahun, sedangkan kuintil tertinggi 11,76 tahun; APK perguruan tinggi kuintil 1 sebesar 17,30, sedangkan kuintil 5 mencapai 55,37; dan akses sanitasi layak pada kuintil 1 sebesar 76,70 persen, jauh di bawah kuintil 5 sebesar 92,08 persen. Makalah ini menyimpulkan bahwa ketimpangan di Indonesia merupakan fenomena struktural yang tertanam dalam konsentrasi kegiatan ekonomi, kualitas layanan dasar yang timpang, produktivitas tenaga kerja yang tidak merata, dan lemahnya konektivitas antartempat. Karena itu, strategi pengurangannya harus melampaui pertumbuhan agregat dan bergerak ke arah pemerataan kualitas pembangunan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Kata kunci: *ketimpangan, kota-desa, antarwilayah, distribusi pendapatan, gini ratio, kemiskinan, layanan dasar, Indonesia*

Ketimpangan Kota-Desa, Antarwilayah, dan Antar-Kelompok Pendapatan

Pendahuluan

Ketimpangan adalah salah satu persoalan paling penting dalam pembangunan karena ia menentukan siapa menikmati pertumbuhan dan siapa tertinggal di belakang. Dalam negara besar dan majemuk seperti

Indonesia, ketimpangan tidak pernah hanya berbentuk selisih pendapatan individu. Ia juga muncul sebagai perbedaan kualitas hidup antarwilayah, perbedaan peluang antara penduduk kota dan desa, serta perbedaan akses terhadap pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan mobilitas sosial antar-kelompok pendapatan. Karena itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekalipun belum tentu berarti pembangunan yang merata. Perekonomian Indonesia tahun 2025 memang tumbuh 5,11 persen, tetapi struktur pertumbuhan itu masih memperlihatkan konsentrasi kegiatan ekonomi yang kuat di Jawa dan perbedaan yang tajam antarwilayah. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Data resmi terbaru memperlihatkan bahwa persoalan ketimpangan di Indonesia masih sangat relevan. Pada September 2025, gini ratio nasional sebesar 0,363. Angka ini memang menurun dibanding Maret 2025 yang sebesar 0,375, tetapi tetap menunjukkan ketimpangan pengeluaran yang nyata. Bahkan bila dirinci, ketimpangan di perkotaan lebih tinggi, yakni 0,383, dibandingkan perdesaan 0,295. Di sisi lain, kemiskinan justru lebih tinggi di desa: 10,72 persen di perdesaan berbanding 6,60 persen di perkotaan. Ini berarti Indonesia menghadapi dua persoalan sekaligus: kota cenderung lebih tidak setara, sementara desa cenderung lebih miskin. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Ketimpangan juga tampak jelas dalam indikator kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia pada 2025 mencapai 75,90, tetapi angka nasional ini menyembunyikan jurang antardaerah yang lebar. DKI Jakarta mencapai 85,05, DI Yogyakarta 82,48, sedangkan Papua Pegunungan hanya 54,91. Dalam ukuran standar hidup yang disesuaikan, DKI Jakarta juga jauh di atas Papua Pegunungan. Artinya, ketimpangan Indonesia bukan hanya soal pengeluaran, tetapi juga soal peluang hidup, umur harapan hidup, pendidikan, dan kapasitas dasar manusia. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Makalah ini berangkat dari pandangan bahwa ketimpangan Indonesia harus dibaca sebagai fenomena berlapis. Lapis pertama adalah

ketimpangan kota-desa. Lapis kedua adalah ketimpangan antarwilayah, baik antar-pulau maupun antarprovinsi. Lapis ketiga adalah ketimpangan antar-kelompok pendapatan, yang tampak pada pendidikan, sanitasi, dan konsumsi. Ketiga lapis ini saling berkaitan. Ketika wilayah tertentu tertinggal, desa-desa di wilayah itu cenderung menghadapi layanan dasar yang lemah. Ketika rumah tangga berada pada kuintil pengeluaran terbawah, mereka lebih mungkin tinggal di lingkungan dengan akses pendidikan dan sanitasi yang kurang baik. Dan ketika konsentrasi ekonomi terlalu berat pada kota-kota besar di wilayah tertentu, kesempatan untuk naik kelas sosial di luar pusat pertumbuhan menjadi lebih sempit. ([World Bank](#))

Kerangka Konseptual Ketimpangan

Secara konseptual, ketimpangan dapat dipahami sedikitnya dalam tiga dimensi. Pertama, ketimpangan vertikal, yaitu perbedaan antara kelompok berpendapatan tinggi dan rendah. Kedua, ketimpangan horizontal atau spasial, yaitu perbedaan antardaerah, antarkelompok sosial, atau antarwilayah. Ketiga, ketimpangan peluang, yakni ketimpangan yang berhubungan dengan akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan publik yang memungkinkan seseorang memperbaiki posisinya. Dalam praktik pembangunan, ketiga dimensi ini jarang terpisah. Rumah tangga miskin tidak hanya kekurangan pendapatan; mereka sering juga tinggal di wilayah yang infrastrukturnya lemah dan memiliki akses layanan dasar yang lebih buruk. ([World Bank](#))

Indonesia memberikan contoh yang kuat tentang keterkaitan tersebut. BPS menunjukkan bahwa distribusi pengeluaran 40 persen terbawah menurut ukuran Bank Dunia pada September 2025 sebesar 19,28 persen secara nasional. Namun ketika dipecah, angka itu hanya 18,32 persen di perkotaan dan 22,09 persen di perdesaan. Ini berarti distribusi pengeluaran di kota lebih timpang, meskipun desa lebih miskin. Dalam istilah lain, kota menghadapi ketimpangan yang tajam di dalam dirinya sendiri, sedangkan

desa menghadapi rata-rata kesejahteraan yang lebih rendah. Kedua bentuk ketimpangan ini menuntut kebijakan yang berbeda. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Dari sudut ekonomi pembangunan, ketimpangan juga berkaitan dengan konsentrasi aglomerasi. Ketika kegiatan ekonomi, investasi, pendidikan tinggi, dan layanan kesehatan berkualitas terkonsentrasi di beberapa wilayah inti, produktivitas wilayah tersebut meningkat lebih cepat daripada wilayah lain. Dalam jangka tertentu, aglomerasi memang dapat mendorong efisiensi. Tetapi bila konektivitas dan redistribusi manfaatnya lemah, aglomerasi justru membekukan ketimpangan spasial. Fakta bahwa Jawa menyumbang 56,93 persen PDB nasional pada 2025 menunjukkan bahwa pusat gravitasi ekonomi Indonesia masih sangat terkonsentrasi. ([BPS Web API](#))

Ketimpangan juga perlu dipahami sebagai persoalan institusional. Ia tidak hanya dihasilkan oleh pasar, tetapi juga oleh kualitas kebijakan publik, efektivitas transfer antardaerah, kualitas belanja pendidikan dan kesehatan, serta kemampuan negara menjamin akses minimum bagi semua warga. Dalam hal ini, indikator seperti IPM, rata-rata lama sekolah, APK perguruan tinggi, dan akses sanitasi layak menjadi penting karena menunjukkan apakah manfaat pembangunan benar-benar menyebar. Ketika perbedaan pada indikator-indikator ini besar, ketimpangan pendapatan cenderung diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Ketimpangan Kota-Desa

Ketimpangan kota-desa di Indonesia memiliki karakter yang paradoksal. Dari sisi kemiskinan, desa lebih tertinggal. BPS mencatat bahwa pada September 2025 persentase penduduk miskin di perkotaan sebesar 6,60 persen, sedangkan di perdesaan 10,72 persen. Jumlah penduduk miskin di kota 11,18 juta orang, sementara di desa 12,18 juta orang. Angka ini menunjukkan bahwa desa masih menjadi kantong kemiskinan yang sangat

besar. Selain itu, garis kemiskinan September 2025 di perkotaan sebesar Rp663.081 per kapita per bulan, sedangkan di perdesaan Rp610.257. Ini memperlihatkan bahwa biaya hidup minimum di kota memang lebih tinggi, tetapi penduduk desa tetap menghadapi risiko miskin yang lebih besar. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Namun dari sisi distribusi, kota justru lebih timpang. Gini ratio September 2025 di perkotaan sebesar 0,383, jauh lebih tinggi daripada di perdesaan yang 0,295. Demikian pula pangsa pengeluaran 40 persen terbawah di kota hanya 18,32 persen, sedangkan di desa 22,09 persen. Dengan kata lain, kota memusatkan kekayaan dan peluang lebih besar, tetapi pembagiannya jauh lebih tidak merata. Desa lebih homogen secara distribusi, tetapi rata-rata tingkat kesejahteraannya lebih rendah. Inilah salah satu ciri penting struktur ketimpangan Indonesia: ketidaksetaraan di kota dan ketertinggalan desa berjalan bersamaan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Secara sosiologis, hal ini dapat dibayangkan melalui dua narasi. Di kota besar, seseorang mungkin tinggal dekat pusat bisnis, universitas, rumah sakit, dan infrastruktur digital, tetapi pada saat yang sama hidup berdampingan dengan kampung-kampung padat yang penghuninya bekerja di sektor informal dan menghadapi biaya hidup tinggi. Di desa, sebaliknya, ketimpangan internal mungkin tidak setajam kota, tetapi kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan akses pekerjaan jauh lebih terbatas. Karena itu, kota-desa bukan sekadar oposisi “maju” versus “tertinggal”, melainkan dua lanskap ketimpangan yang berbeda bentuk. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

World Bank mencatat bahwa kemajuan pengurangan kemiskinan sejak pandemi juga tidak seragam antara kota dan desa. Dalam *Poverty & Equity Brief* Oktober 2025, Bank Dunia menyebut bahwa perdesaan mengalami penurunan kemiskinan yang lebih tajam sejak 2019, sedangkan penurunan kemiskinan perkotaan lebih lambat; bahkan Maret 2025 menjadi kali pertama kemiskinan perkotaan turun di bawah tingkat pra-pandemi.

Temuan ini menambah nuansa penting: desa masih lebih miskin, tetapi kota juga menghadapi tekanan struktural tersendiri, terutama terkait biaya hidup, pekerjaan, dan akses perumahan. ([World Bank](#))

Kesenjangan kota-desa juga tercermin pada layanan dasar. BPS memiliki tabel nasional mengenai akses rumah tangga terhadap sumber air minum layak menurut provinsi dan klasifikasi desa, yang menunjukkan bahwa akses layanan dasar memang dipantau sebagai persoalan spasial. Kajian World Bank tentang akses layanan kesehatan dasar juga menegaskan bahwa disparitas geografis dalam hasil kesehatan di Indonesia berkaitan erat dengan perbedaan akses fisik dan mutu layanan kesehatan. Dengan kata lain, ketertinggalan desa bukan hanya masalah pendapatan, tetapi juga masalah jarak, kualitas layanan, dan infrastruktur lokal. ([World Bank](#))

Ketimpangan Antarwilayah

Ketimpangan antarwilayah di Indonesia tampak sangat jelas bila dilihat dari konsentrasi ekonomi. Menurut BPS, pada tahun 2025 Pulau Jawa masih menunjukkan peranan yang sangat kuat dalam perekonomian Indonesia, dengan kontribusi 56,93 persen terhadap PDB nasional. Pada saat yang sama, pertumbuhan ekonomi terjadi di seluruh kelompok wilayah, tetapi tidak seragam: Jawa dan Sulawesi tumbuh di atas rata-rata nasional, sedangkan Maluku dan Papua hanya tumbuh 2,69 persen. Artinya, bukan hanya ukuran ekonomi Jawa yang dominan, tetapi juga dinamika pertumbuhannya masih relatif lebih kuat daripada kawasan timur tertentu. ([BPS Web API](#))

Ketimpangan antarwilayah juga tercermin dalam kualitas hidup. IPM Indonesia tahun 2025 mencapai 75,90, tetapi rentangnya antarprovinsi sangat lebar. DKI Jakarta mencapai 85,05, DI Yogyakarta 82,48, sementara Papua Pegunungan hanya 54,91. Perbedaan lebih dari 30 poin ini tidak bisa dianggap kecil; ia mencerminkan jurang besar dalam umur harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup layak. Bila standar hidup riil dilihat melalui pengeluaran per kapita disesuaikan, kesenjangannya juga sangat lebar: DKI

Jakarta tercatat 20.676, sedangkan Papua Pegunungan 5.861. Ini menunjukkan bahwa ketimpangan wilayah di Indonesia bersifat multidimensi: ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kapasitas konsumsi bergerak bersama. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Ketimpangan antarwilayah juga terlihat dalam distribusi ketimpangan itu sendiri. Gini ratio tertinggi pada September 2025 tercatat di Provinsi Papua Selatan sebesar 0,426, sedangkan terendah di Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,214. Perbedaan ini penting karena memperlihatkan bahwa ketimpangan Indonesia tidak seragam bahkan di antara wilayah-wilayah yang sama-sama berada di luar Jawa. Ada provinsi yang menghadapi ketimpangan distribusi sangat tinggi, dan ada yang jauh lebih merata. Dengan demikian, pembacaan antarwilayah harus hati-hati: luar Jawa bukan satu blok homogen, demikian pula kawasan timur bukan satu kategori tunggal. ([Sulawesi Selatan Stats](#))

Bila ditarik lebih jauh, ketimpangan antarwilayah juga menyangkut perbedaan antara pusat pertumbuhan dan wilayah penyangga atau tertinggal. Jawa, DKI Jakarta, Yogyakarta, dan beberapa provinsi industri memiliki kepadatan kegiatan ekonomi, pendidikan tinggi, dan infrastruktur yang lebih baik. Sebaliknya, wilayah seperti Papua Pegunungan menghadapi tantangan topografi, konektivitas, biaya layanan, dan kapasitas institusional yang lebih berat. World Bank menegaskan bahwa ketimpangan spasial di Indonesia bertahan baik di dalam kawasan urban maupun di seluruh "portfolio of places" Indonesia, sehingga potensi pertumbuhan dari urbanisasi bisa hilang ketika infrastruktur lokal dan konektivitas tidak memadai. ([World Bank](#))

Aspek antarwilayah juga tercermin pada kemiskinan. BPS pada Maret 2025 mencatat bahwa persentase penduduk miskin tertinggi terdapat di Papua Pegunungan sebesar 30,03 persen, sedangkan terendah di Bali sebesar 3,72 persen. Meskipun angka ini berasal dari Maret 2025, ia memberi ilustrasi kuat tentang jurang kesejahteraan antardaerah yang tetap relevan

dalam membaca struktur Indonesia hingga 2026. Kesenjangan sebesar itu menunjukkan bahwa pertumbuhan nasional tidak secara otomatis menghapus perbedaan titik awal dan hambatan struktural yang dihadapi wilayah tertentu. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Ketimpangan Antar-Kelompok Pendapatan

Ketimpangan antarkelompok pendapatan di Indonesia tampak paling jelas ketika data dibagi menurut kuintil pengeluaran. Dalam pendidikan, jurangnya sangat lebar. Rata-rata lama sekolah penduduk umur 15 tahun ke atas pada 2025 untuk kuintil 1 hanya 7,58 tahun, sedangkan kuintil 5 mencapai 11,76 tahun. Artinya, kelompok terbawah secara rata-rata bahkan belum menyelesaikan pendidikan menengah penuh, sementara kelompok teratas sudah mendekati atau melewati jalur pendidikan menengah atas dan awal pendidikan tinggi. Ketimpangan seperti ini bukan sekadar hasil dari perbedaan pendapatan saat ini, tetapi juga sumber dari perbedaan pendapatan masa depan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Kesenjangan menjadi lebih tajam pada pendidikan tinggi. APK perguruan tinggi menurut kuintil pengeluaran pada 2025 menunjukkan kuintil 1 sebesar 17,30, kuintil 2 sebesar 23,66, dan kuintil 5 sebesar 55,37. Ini berarti anak muda dari rumah tangga kuintil tertinggi memiliki peluang jauh lebih besar masuk perguruan tinggi dibandingkan anak muda dari rumah tangga kuintil terbawah. Jika pendidikan tinggi semakin menentukan akses ke pekerjaan formal, profesional, dan berupah lebih tinggi, maka ketimpangan antarkuintil ini akan dengan mudah direproduksi ke pasar kerja dan distribusi pendapatan generasi berikutnya. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Pada pendidikan menengah atas pun perbedaannya sudah terlihat. BPS mencatat APK SMA/SMK/MA sederajat menurut kuintil pengeluaran tahun 2025 pada kuintil 1 sebesar 82,64 dan kuintil 2 sebesar 90,35. Meskipun datanya tidak sepenuhnya dikutip sampai kuintil tertinggi di cuplikan singkat, arah umumnya jelas: semakin tinggi kuintil pengeluaran, semakin

besar peluang bertahan di pendidikan menengah atas dan melanjutkan ke perguruan tinggi. Maka ketimpangan pendapatan bekerja melalui ketimpangan pendidikan sejak awal siklus hidup. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Pada layanan dasar, ketimpangan antarkelompok pendapatan juga jelas. BPS mencatat bahwa akses rumah tangga terhadap sanitasi layak pada 2025 di kuintil 1 sebesar 76,70 persen, sedangkan di kuintil 5 sebesar 92,08 persen. Perbedaan ini berarti bahwa rumah tangga terbawah bukan hanya hidup dengan daya beli lebih rendah, tetapi juga dengan kualitas lingkungan hidup yang lebih buruk. Dalam jangka panjang, sanitasi yang buruk memengaruhi kesehatan anak, absensi sekolah, beban biaya kesehatan, dan produktivitas kerja. Maka, ketimpangan layanan dasar sesungguhnya adalah ketimpangan dalam peluang bertahan hidup sehat dan produktif. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Dalam indikator standar hidup yang lebih luas, ketimpangan ini juga tampak pada tingkat provinsi. BPS mencatat pengeluaran per kapita disesuaikan 2025 di DKI Jakarta sebesar 20.676, sedangkan Papua Pegunungan 5.861. Meskipun ini indikator wilayah, ia memperlihatkan bagaimana standar hidup layak yang dinikmati kelompok-kelompok penduduk di provinsi berbeda dapat sangat berjauhan. Ketika kesenjangan wilayah bertemu kesenjangan pendapatan dalam wilayah itu sendiri, maka ketimpangan menjadi berlapis: orang miskin di provinsi tertinggal berada pada posisi yang jauh lebih sulit daripada orang miskin di wilayah yang infrastrukturnya lebih baik. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Interaksi Tiga Lapis Ketimpangan

Yang membuat persoalan ketimpangan di Indonesia sulit adalah karena tiga lapisan tadi saling bertemu. Rumah tangga kuintil terbawah lebih mungkin tinggal di perdesaan atau di kantong-kantong urban miskin. Wilayah yang tertinggal cenderung memiliki IPM lebih rendah, akses infrastruktur lebih buruk, dan peluang ekonomi yang lebih sempit.

Akibatnya, ketimpangan pendapatan tidak hanya berada “di dalam” masyarakat, tetapi juga “di antara” tempat-tempat yang berbeda. Ketika seorang anak lahir dari keluarga miskin di provinsi yang IPM-nya rendah dan layanan dasarnya terbatas, ia menghadapi hambatan berlapis sejak awal hidup. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Contoh sederhananya dapat dilihat melalui pendidikan. Anak dari kuintil pendapatan tertinggi memiliki peluang jauh lebih besar menyelesaikan pendidikan tinggi. Tetapi jika ia juga tinggal di wilayah dengan IPM tinggi seperti DKI Jakarta atau DI Yogyakarta, maka peluang itu diperkuat lagi oleh ketersediaan sekolah, kampus, infrastruktur digital, dan jejaring ekonomi yang lebih baik. Sebaliknya, anak dari kuintil bawah di wilayah dengan IPM rendah menghadapi dua penghalang sekaligus: keterbatasan rumah tangga dan keterbatasan wilayah. Dalam kerangka seperti ini, ketimpangan tidak cukup dijelaskan oleh satu variabel tunggal. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Interaksi serupa juga terjadi pada pasar kerja. Kota besar menawarkan pekerjaan formal, tetapi juga memperlihatkan ketimpangan distribusi yang lebih tinggi. Desa mungkin lebih setara secara distribusi, tetapi pilihan kerja produktif dan formal lebih sedikit. Wilayah-wilayah tertinggal mungkin memiliki solidaritas sosial yang kuat, tetapi terbatas dalam akses pendidikan, kesehatan, dan pasar. Maka, strategi pengurangan ketimpangan harus bisa membaca hubungan antara lokasi, kelas pendapatan, dan struktur peluang ekonomi. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Faktor-Faktor Struktural Penyebab Ketimpangan

Ada beberapa faktor struktural yang menjelaskan mengapa ketimpangan Indonesia bertahan. Pertama, konsentrasi ekonomi. Ketika 56,93 persen PDB nasional masih bertumpu pada Jawa, maka wilayah lain harus berjuang lebih keras untuk mengejar. Konsentrasi ini berkaitan dengan sejarah pembangunan, infrastruktur, birokrasi, pasar tenaga kerja, dan

kedekatan dengan pusat pengambilan keputusan. Selama pusat pertumbuhan utama tetap sangat terkonsentrasi, wilayah lain cenderung bergerak dengan kecepatan berbeda. ([BPS Web API](#))

Kedua, ketimpangan kualitas layanan dasar. Data pendidikan dan sanitasi menurut kuintil menunjukkan bahwa kelompok bawah tertinggal dalam modal manusia dan kesehatan lingkungan. World Bank juga menegaskan bahwa ketimpangan geografis dalam kesehatan di Indonesia dipengaruhi akses fisik dan mutu layanan. Jika akses dasar ini tidak setara, maka produktivitas dan mobilitas sosial akan terus timpang. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Ketiga, perbedaan kualitas urbanisasi. World Bank menilai bahwa manfaat urbanisasi di Indonesia bisa hilang ketika infrastruktur lokal tidak memadai dan ketimpangan spasial bertahan di dalam area perkotaan. Ini berarti urbanisasi tidak otomatis mengurangi ketimpangan. Tanpa perumahan yang layak, transportasi yang efisien, dan layanan dasar yang merata, kota justru dapat menjadi ruang akumulasi ketimpangan baru. ([World Bank](#))

Keempat, keterbatasan konektivitas antarwilayah. Ketimpangan wilayah di Indonesia tidak terlepas dari geografi kepulauan, biaya logistik, dan perbedaan akses pasar. Ketika jasa pendidikan tinggi, kesehatan rujukan, pekerjaan formal, dan industri manufaktur terkonsentrasi di beberapa wilayah, daerah lain tertahan pada basis produktivitas yang lebih rendah. Akibatnya, distribusi pendapatan nasional menjadi mengikuti peta konektivitas nasional. ([World Bank](#))

Kelima, ketahanan kelompok rentan yang masih lemah. BPS menunjukkan bahwa selain penduduk miskin, Indonesia juga memiliki kelompok rentan miskin yang sangat besar. Ini berarti ketimpangan tidak hanya berada di ujung bawah distribusi, tetapi juga pada rapuhnya kelas-kelas menengah bawah untuk mempertahankan posisinya. Ketika kelompok rentan sangat besar, kesenjangan antarkelompok pendapatan menjadi lebih mudah melebar saat terjadi guncangan ekonomi. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Implikasi Kebijakan

Implikasi pertama adalah bahwa pertumbuhan ekonomi nasional harus dipasangkan dengan strategi pemerataan spasial. Selama Jawa terus menjadi pusat utama pertumbuhan dan wilayah lain tertinggal, maka ketimpangan antarwilayah akan tetap kuat. Karena itu, kebijakan tidak cukup berhenti pada “mendorong pertumbuhan”, tetapi harus bertanya di mana pertumbuhan itu terjadi, sektor apa yang tumbuh, dan apakah ia menciptakan konektivitas dengan wilayah lain. ([BPS Web API](#))

Implikasi kedua adalah bahwa kebijakan kota-desa harus dibedakan. Di desa, fokus utama tetap pada pengurangan kemiskinan, produktivitas, dan layanan dasar. Di kota, tantangan utamanya lebih banyak pada distribusi peluang, biaya hidup, kualitas permukiman, dan ketimpangan intra-urban. Karena bentuk masalahnya berbeda, resep kebijakannya pun tidak bisa seragam. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Implikasi ketiga adalah pentingnya intervensi pada antarkelompok pendapatan melalui pendidikan dan layanan dasar. Data kuintil pengeluaran menunjukkan jurang yang tajam pada rata-rata lama sekolah, APK perguruan tinggi, dan sanitasi. Artinya, redistribusi pendapatan saja tidak cukup. Indonesia membutuhkan redistribusi peluang. Tanpa itu, anak-anak dari kuintil bawah akan terus memasuki pasar kerja dari posisi yang lebih lemah. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Implikasi keempat adalah perlunya memperkuat kapasitas negara di wilayah tertinggal. Ketimpangan bukan hanya akibat pasar, tetapi juga akibat perbedaan kualitas institusi lokal, layanan publik, dan infrastruktur. Karena itu, transfer fiskal, kebijakan afirmatif, dan investasi publik di wilayah tertinggal tetap penting, tetapi harus dirancang agar benar-benar meningkatkan kualitas hidup, bukan hanya memperbesar belanja nominal. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Implikasi kelima adalah perlunya indikator ketimpangan yang lebih kaya daripada angka nasional tunggal. Gini ratio nasional 0,363 penting, tetapi tidak cukup. Perbedaan 0,383 di kota dan 0,295 di desa, perbedaan IPM antarprovinsi, serta perbedaan pendidikan dan sanitasi menurut kuintil menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan pembacaan ketimpangan yang multidimensi. Hanya dengan begitu kebijakan dapat menyasar sumber masalah yang tepat. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Penutup

Ketimpangan Indonesia pada dasarnya adalah ketimpangan berlapis. Kota dan desa tidak hanya berbeda tingkat kemiskinannya, tetapi juga berbeda bentuk ketidaksetaraannya. Antarwilayah tidak hanya berbeda dalam tingkat pertumbuhan, tetapi juga dalam kualitas hidup dan standar hidup layak. Antar-kelompok pendapatan tidak hanya berbeda dalam besar pengeluaran, tetapi juga dalam kesempatan memperoleh pendidikan tinggi, sanitasi, dan posisi awal untuk naik kelas sosial. Karena itu, ketimpangan Indonesia tidak dapat direduksi menjadi satu angka nasional saja. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Data 2025–awal 2026 menunjukkan dua hal sekaligus. Pertama, Indonesia membuat kemajuan: gini ratio nasional menurun, kemiskinan turun, dan IPM nasional meningkat. Kedua, kemajuan itu belum cukup untuk menutup jurang struktural antara kota dan desa, antara Jawa dan banyak wilayah lain, serta antara kuintil terbawah dan kuintil teratas. Karena itu, tantangan pembangunan Indonesia ke depan bukan hanya bagaimana mempertahankan pertumbuhan, tetapi bagaimana membuat pertumbuhan itu mengurangi jarak antarmanusia dan antartempat secara lebih nyata. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Pada akhirnya, negara yang berkembang bukanlah negara yang hanya mampu menambah output, melainkan negara yang mampu memperluas peluang hidup. Ketika seorang anak di desa memiliki peluang pendidikan yang makin dekat dengan anak di kota; ketika provinsi di timur memiliki

kualitas hidup yang makin mendekati wilayah paling maju; dan ketika kuintil bawah tidak lagi tertinggal jauh dalam pendidikan, sanitasi, dan pengeluaran riil, barulah ketimpangan benar-benar mulai diperkecil. Itulah ukuran paling substantif dari pembangunan yang inklusif. ([World Bank](#))

Glosarium

Ketimpangan kota-desa: perbedaan tingkat kesejahteraan, kemiskinan, distribusi pengeluaran, dan akses layanan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Pada September 2025, kemiskinan perdesaan 10,72 persen, sedangkan perkotaan 6,60 persen; tetapi gini ratio perkotaan 0,383, lebih tinggi daripada perdesaan 0,295. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Ketimpangan antarwilayah: perbedaan tingkat pembangunan, pertumbuhan, atau kualitas hidup antarpulau, antarprovinsi, atau antar-kawasan. Pada 2025, Jawa menyumbang 56,93 persen PDB nasional, sedangkan wilayah Maluku dan Papua tumbuh 2,69 persen. ([BPS Web API](#))

Ketimpangan antar-kelompok pendapatan: perbedaan peluang dan hasil pembangunan antar-kelompok pengeluaran atau pendapatan, misalnya antar-kuintil. Contohnya terlihat pada rata-rata lama sekolah 7,58 tahun di kuintil 1 dan 11,76 tahun di kuintil 5. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Gini ratio: ukuran ketimpangan distribusi pengeluaran atau pendapatan. Angka mendekati 0 menunjukkan distribusi lebih merata, sedangkan mendekati 1 menunjukkan ketimpangan lebih tinggi. Gini ratio Indonesia September 2025 sebesar 0,363. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Kuintil pengeluaran: pembagian penduduk menjadi lima kelompok berdasarkan tingkat pengeluaran rumah tangga, dari 20 persen terbawah

hingga 20 persen teratas. BPS memakai klasifikasi ini untuk melihat kesenjangan pendidikan, sanitasi, dan indikator kesejahteraan lainnya.

([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

IPM (Indeks Pembangunan Manusia): indikator komposit yang mengukur umur harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup layak. IPM Indonesia 2025 sebesar 75,90; DKI Jakarta 85,05; Papua Pegunungan 54,91.

([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

APK Perguruan Tinggi: Angka Partisipasi Kasar pendidikan tinggi, yang menunjukkan tingkat partisipasi pada pendidikan tinggi tanpa memperhatikan ketepatan usia. APK PT kuintil 1 pada 2025 sebesar 17,30, sedangkan kuintil 5 sebesar 55,37. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Sanitasi layak: akses rumah tangga pada fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kesehatan. Pada 2025, akses sanitasi layak di kuintil 1 sebesar 76,70 persen dan di kuintil 5 sebesar 92,08 persen. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Referensi (APA 7)

Badan Pusat Statistik. (2025, 25 Juli). *Persentase penduduk miskin Maret 2025 turun menjadi 8,47 persen*. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2025, 5 November). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2025 mencapai 75,90*. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2025, 5 November). *Siaran pers Badan Pusat Statistik*. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2025, 12 Desember). *Rata-rata lama sekolah penduduk umur 15 tahun ke atas menurut kuintil pengeluaran*. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2025, 12 Desember). *Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi menurut kuintil pengeluaran*. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2025, 16 Desember). *Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak menurut kuintil pengeluaran*. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026, 5 Februari). *Gini ratio September 2025 tercatat sebesar 0,363*. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026, 5 Februari). *Persentase penduduk miskin September 2025 turun menjadi 8,25 persen*. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026, 5 Februari). *Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11 persen*. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026, 12 Februari). *Indeks Pembangunan Manusia menurut provinsi, 2025*. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026, 10 Maret). *Produk Domestik Regional Bruto per kapita atas dasar harga berlaku menurut provinsi, 2025*. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2025, 5 November). *Pengeluaran per kapita disesuaikan*. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

World Bank. (2025, June). *Indonesia Economic Prospects: A roadmap from homes to jobs to prosperity in Indonesia*. ([Open Knowledge Repository](#))

World Bank. (2025, October). *Poverty & Equity Brief: Indonesia*. ([World Bank](#))

Rudy C Tarumingkeng: Ketimpangan kota-desa, antarwilayah, dan antar-kelompok pendapatan

World Bank. (2025). *A multifactorial accessibility study of public primary health care in Indonesia*. ([World Bank](#))

World Bank. (2020). *Indonesia Systematic Country Diagnostic Update*. ([World Bank](#))

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 7 April 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69d4b1d7-91a0-839b-8cb9-b5d86c596a23>